

Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Perspektif Performance Management di Kabupaten Sigi

Risqi Amalia¹, Norlin Terontja², Fajriyatul Putri³, Nina Yusnita Yamin⁴, Betty⁵, Andi Chairil Furqan⁶

¹⁻⁶Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponding Author: Risqi Amalia, e-mail: amalariisqi11@gmail.com

Published: February, 2026

ABSTRACT

Fiscal decentralization in Indonesia has mandated local governments to enhance their fiscal autonomy through optimization of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). However, the implementation of performance management systems in revenue management remains nascent and insufficiently integrated into strategic decision-making processes. This study evaluates the performance of revenue management at Sigi Regency during 2022–2024 through a performance management lens, utilizing a descriptive quantitative approach. The research analyzes three key indicators: revenue effectiveness ratios, year-on-year growth rates, and PAD contribution to total regional revenue, based on official financial reports from the Regional Revenue Agency (Bapenda). Findings demonstrate that Sigi Regency achieved positive quantitative results: effectiveness ratios ranging from 97.96% to 124.29%, average revenue growth of 20.07% annually (exceeding national benchmark of 8–10%), and consistent upward trends in revenue realization. However, evaluation through the performance management framework reveals output-oriented rather than process and learning-oriented implementation, as evidenced by: (1) relatively low PAD contribution to total revenue (indicating persistent dependency on central government transfers of 60–85%), (2) unoptimized integration of performance information into strategic decision-making, and (3) incomplete revenue diversification strategy. This study concludes that while Kabupaten Sigi demonstrates commendable financial performance quantitatively, strengthening the performance management cycle particularly in performance information utilization, managerial capacity building, and development of long-term fiscal independence strategies remains essential for sustainable revenue management improvements.

Keywords: Fiscal Decentralization; Performance Management; Local Own-Source Revenue; Financial Performance Evaluation; Sigi Regency.

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memandatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, implementasi sistem performance management dalam pengelolaan pendapatan masih pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal ke dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan Kabupaten Sigi selama periode 2022–2024 melalui perspektif performance management dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian menganalisis tiga indikator utama: rasio efektivitas pendapatan, laju pertumbuhan pendapatan antartahun, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, berdasarkan laporan keuangan resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi mencapai hasil kuantitatif yang positif dengan rasio efektivitas berkisar 97,96%–124,29%, pertumbuhan pendapatan rata-rata 20,07% per tahun (melampaui benchmark nasional 8–10%), dan tren peningkatan realisasi pendapatan yang konsisten. Namun, evaluasi melalui kerangka performance management mengungkapkan implementasi yang masih bersifat output-oriented daripada process dan learning-oriented, sebagaimana ditunjukkan oleh: (1) kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang relatif rendah (mengindikasikan ketergantungan terhadap dana transfer pusat sebesar 60–85%), (2) pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan strategis yang belum optimal, dan (3) strategi diversifikasi pendapatan yang belum sepenuhnya terimplementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Sigi menunjukkan kinerja keuangan yang baik secara kuantitatif, penguatan siklus performance management khususnya dalam pemanfaatan informasi kinerja, penguatan kapasitas manajerial, dan pengembangan strategi kemandirian fiskal jangka panjang tetap menjadi prasyarat penting bagi peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Performance Management; Pendapatan Asli Daerah; Evaluasi Kinerja Keuangan; Kabupaten Sigi.

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oates (1999) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya, namun pada saat yang sama meningkatkan tuntutan akuntabilitas atas kinerja pengelolaan pendapatan tersebut. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sambil memberikan layanan publik yang berkualitas.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis dalam mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Fortea (2025) menunjukkan bahwa kinerja keuangan sektor publik, khususnya pada sisi pendapatan daerah, sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal secara berkelanjutan. Temuan serupa dikemukakan oleh Zamzami & Rakhman (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di negara berkembang sangat bergantung pada kualitas perencanaan pendapatan, kapasitas institusional, serta sistem pengendalian kinerja yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Secara empiris, penelitian di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan bahwa PAD rata-rata berkontribusi antara 10-15 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Namun, pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan PAD terbukti memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam literatur keuangan publik, kinerja pengelolaan pendapatan daerah umumnya diukur melalui indikator efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Dudin et al (2025) menekankan bahwa analisis kinerja keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi keuangan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hasthoro & Sunardi (2016) menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan sektor publik merupakan praktik penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan mendorong akuntabilitas publik. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi kinerja, bukan sekadar sebagai bentuk pertanggungjawaban formal.

Seiring dengan perkembangan paradigma new public management dan performance-based governance, konsep performance management menjadi semakin penting dalam pengelolaan sektor publik. Castelo & Gomes (2024) mendefinisikan performance management sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk memperbaiki kinerja organisasi publik secara berkelanjutan. Verbeeten (2008) menyatakan bahwa performance management berfungsi sebagai jembatan antara strategi organisasi dan hasil kinerja yang dicapai, memastikan bahwa indikator kinerja terhubung dengan proses pengambilan keputusan manajerial. Ferreira & Otley (2009) serta Christensen et al (2006) menegaskan bahwa sistem performance management yang efektif harus mampu menghubungkan indikator kinerja dengan proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan

publik, dan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas tata kelola dan komitmen organisasi dalam menggunakan informasi kinerja secara konsisten. Studi Prabowo & Bawono (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip performance management berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pendapatan daerah, dengan temuan bahwa efisiensi dan efektivitas pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas sistem pengukuran kinerja dan kapasitas institusional. Implementasi performance-based budgeting di berbagai yurisdiksi menunjukkan hasil signifikan: pengurangan budget variance dari rata-rata 8,3% menjadi 7% post-implementasi, dan peningkatan frekuensi pelaporan kinerja sebesar 25%.

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan performance management tidak dapat dilepaskan dari aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Cienfuegos et al (2025) menekankan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu mekanisme utama untuk memastikan akuntabilitas publik dan penciptaan nilai publik (public value). Arnaboldi et al (2015) menunjukkan bahwa reformasi penganggaran berbasis kinerja di sektor publik bertujuan untuk memperkuat hubungan antara alokasi anggaran, kinerja, dan hasil (outcome) kebijakan. Penelitian terbaru pada unit kerja perangkat daerah (SKPD) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan implementasi penganggaran berbasis kinerja memiliki dampak positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan peran akuntabilitas sebagai mediator penting dalam hubungan tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi administrasi publik turut memengaruhi kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Mucoz & Bolívar (2015) serta Siswadhi (2025) menemukan bahwa transparansi dan pemanfaatan sistem informasi digital dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan. OECD (2023) menegaskan bahwa penguatan sistem informasi kinerja dan keuangan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada hasil. Di Indonesia, inisiatif digitalisasi seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), e-budgeting, dan e-procurement telah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan fragmentasi kebijakan dan keterbatasan infrastruktur di berbagai daerah.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja pendapatan daerah dan penerapan performance management, sebagian besar studi masih bersifat lintas negara atau berfokus pada hubungan makro antara desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan. Penelitian empiris yang secara spesifik mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah pada level pemerintah kabupaten di Indonesia, dengan menggunakan perspektif performance management dan data laporan keuangan secara berkelanjutan, masih relatif terbatas. Studi-studi yang ada pada tingkat kabupaten umumnya menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan tradisional (efektivitas, efisiensi, kemandirian) tanpa mengintegrasikan keseluruhan siklus performance management yang mencakup perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan.

Kabupaten Sigi sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi PAD. Data terkini menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi telah mencapai realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2024 dengan tingkat pencapaian 99,10%, dengan PAD terealisasi sebesar Rp84 miliar atau 98,01% dari target Rp86 miliar. Pencapaian ini didukung oleh konsistensi laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Meskipun demikian, evaluasi komprehensif terhadap efektivitas seluruh siklus performance management dalam pengelolaan pendapatan daerah masih belum dilakukan (Salam, 2024).

Oleh karena itu, evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana target pendapatan telah dicapai, bagaimana efektivitas realisasi PAD dalam periode tertentu, bagaimana struktur pendapatan daerah terbentuk, serta bagaimana informasi kinerja

dimanfaatkan dalam mendukung pengambilan keputusan fiskal pemerintah daerah. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mendasari studi ini adalah: (1) Bagaimana kinerja perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi dalam menetapkan target pendapatan yang realistis dan berbasis potensi ekonomi lokal? (2) Bagaimana tingkat efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2022–2024? (3) Bagaimana pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan dengan membandingkan realisasi terhadap target serta menganalisis tren antarperiode? (4) Bagaimana informasi kinerja pendapatan daerah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pendapatan pada periode berikutnya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi selama periode 2022–2024 berdasarkan perspektif performance management, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur mengenai implementasi performance management pada tingkat kabupaten di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan dan optimalisasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi ke depannya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang merupakan pendekatan penelitian ilmiah yang menggunakan data terstruktur dan analisis statistik untuk mengukur dan merangkum karakteristik fenomena secara objektif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sigi secara faktual berdasarkan data keuangan yang tersedia, tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik inferensial. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi komprehensif kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui perspektif performance management, dengan analisis capaian kinerja pendapatan dan pemanfaatan informasi kinerja dalam mendukung pengambilan keputusan fiskal pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan deskriptif mengenai "apa" (karakteristik kinerja), "berapa banyak" (tingkat pencapaian), dan "bagaimana" (pola dan tren kinerja) dalam pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus mengintegrasikan dimensi manajerial dari sistem performance management.

2. Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan objek kajian berupa pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu fungsi strategis dalam manajemen keuangan daerah. Periode penelitian mencakup tahun anggaran 2022–2024, dipilih dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tiga tahun ini cukup merepresentasikan tren kinerja pendapatan daerah secara berkelanjutan dan memungkinkan analisis perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dalam periode pasca-pandemi COVID-19. Rentang waktu ini juga memadai untuk mengidentifikasi konsistensi kinerja, efektivitas kebijakan pendapatan yang berlaku, serta pola pengambilan keputusan manajerial yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam merespons kondisi ekonomi lokal.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, dengan pertimbangan bahwa data sekunder dari laporan keuangan resmi pemerintah daerah telah melalui proses verifikasi dan audit, sehingga memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Data diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sigi, mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun-tahun 2022, 2023, dan 2024 yang berisi informasi detail mengenai target dan realisasi pendapatan daerah dalam berbagai kategori. Selain LRA, penelitian juga memanfaatkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menyajikan penjelasan rinci dan analitik mengenai setiap

komponen pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penggunaan data sekunder ini dipilih karena data tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan representasi akurat dari kinerja keuangan daerah yang dapat dijadikan dasar analisis objektif. Data-data pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan pendapatan daerah, seperti dokumen perencanaan pendapatan dalam APBD dan dokumen evaluasi kinerja yang disusun oleh unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, juga diintegrasikan untuk memberikan konteks manajerial yang lebih lengkap (Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, 2011).

4. Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi, dengan fokus spesifik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Fokus penelitian mencakup empat komponen utama PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian juga menganalisis target dan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan, serta kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator tingkat kemandirian. Dalam kerangka performance management, fokus penelitian diarahkan pada evaluasi menyeluruh mengenai proses perencanaan pendapatan (penetapan target realistis berbasis potensi), pelaksanaan dan pengukuran kinerja (realisasi dan indikator kinerja), monitoring dan evaluasi kinerja (analisis deviasi dan tren), serta pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan fiskal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang bersumber dari laporan keuangan dan dokumen resmi pemerintah daerah. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut: pertama, identifikasi dan koleksi dokumen resmi yang relevan dengan periode penelitian (2022–2024) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) atau unit serupa yang mengelola pendapatan daerah. Kedua, pengorganisasian data dalam format terstruktur yang memudahkan proses analisis, meliputi ekstraksi data target pendapatan, realisasi pendapatan menurut komponen PAD, dan informasi pendukung lainnya. Ketiga, validasi keakuratan data dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam matriks atau tabel data yang sistematis untuk keperluan analisis kinerja pendapatan daerah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Nurfadila, 2024).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan indikator kinerja keuangan daerah yang relevan dengan perspektif performance management. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga komponen utama yang terintegrasi dalam siklus performance management.

Pertama, Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran. Rasio efektivitas dihitung menggunakan rumus: $\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$. Hasil perhitungan diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar kinerja keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam praktek manajemen keuangan pemerintah daerah Indonesia: rasio 100% diklasifikasikan sebagai sangat efektif, rasio 90%–99% sebagai efektif, rasio 80%–89% sebagai cukup efektif, dan rasio di bawah 80% sebagai kurang efektif. Indikator ini penting dalam performance management karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan yang realistis dan pelaksanaan penggalan pendapatan sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan (Riantisari et al., 2025).

Kedua, Analisis Pertumbuhan Pendapatan digunakan untuk menilai perkembangan dan dinamika PAD dari tahun ke tahun, memberikan gambaran mengenai tren peningkatan atau penurunan kinerja pendapatan daerah selama periode penelitian. Pertumbuhan pendapatan dihitung menggunakan rumus: $\text{Pertumbuhan} = ((\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1) / \text{Pendapatan Tahun } t-1) \times 100\%$. Analisis pertumbuhan ini penting dalam konteks performance management karena memberikan umpan balik (feedback) mengenai efektivitas kebijakan pendapatan yang diterapkan dan menunjukkan apakah upaya optimalisasi PAD telah menghasilkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Tren pertumbuhan juga menjadi dasar evaluasi untuk periode berikutnya dalam siklus perbaikan kinerja berkelanjutan.

Ketiga, Analisis Kontribusi Pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi dan komposisi masing-masing komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD) terhadap total pendapatan daerah dan terhadap total PAD. Analisis ini menggunakan rumus: $\text{Kontribusi} = (\text{Komponen Pendapatan} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$ atau $(\text{Komponen PAD} / \text{Total PAD}) \times 100\%$. Analisis kontribusi bertujuan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang dominan dan potensi optimalisasi dari berbagai komponen pendapatan daerah. Dalam perspektif performance management, analisis kontribusi membantu dalam evaluasi keseimbangan struktur pendapatan daerah dan identifikasi komponen pendapatan yang memiliki ruang pertumbuhan signifikan untuk periode perencanaan berikutnya.

7. Keterkaitan Analisis dengan Perspektif Performance Management

Hasil analisis rasio efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi pendapatan selanjutnya diinterpretasikan secara holistik dalam kerangka siklus performance management, yang terdiri dari empat fase: perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan. Pada fase perencanaan, analisis efektivitas digunakan untuk menilai kesesuaian dan realibilitas antara target pendapatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan kapasitas riil penggalan pendapatan daerah. Pada fase pelaksanaan dan pengukuran, ketiga indikator (efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi) digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang capaian kinerja pendapatan. Pada fase monitoring dan evaluasi, hasil perhitungan indikator-indikator tersebut dibandingkan antarperiode untuk mengidentifikasi tren, konsistensi, dan deviasi kinerja pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan khususnya memberikan informasi tentang dinamika perubahan kinerja yang menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas kebijakan pendapatan yang diterapkan.

Pada fase terakhir, yaitu pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana informasi kinerja pendapatan yang dihasilkan dari analisis indikator-indikator tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan, kebijakan, dan strategi pengelolaan pendapatan daerah pada periode berikutnya. Dengan demikian, analisis kinerja pendapatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka-angka keuangan semata, tetapi juga pada dimensi evaluatif dan manajerial dari sistem performance management dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan literatur terkini dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan pentingnya menggunakan informasi kinerja secara aktif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas publik.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022–2024

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Sigi untuk periode 2022–2024, kinerja pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan dinamika yang signifikan dengan pola perkembangan yang mencerminkan transisi menuju sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih matang. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, realisasi pendapatan daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kabupaten Sigi menunjukkan tren peningkatan konsisten dari Rp24,45 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp35,24 miliar pada tahun 2024, yang merepresentasikan pertumbuhan kumulatif sebesar 44,15 persen selama periode tiga tahun tersebut. Pencapaian ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kapasitas penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (Salam, 2024).

Tabel 1. Kinerja Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022–2024

Tahun	Target (Rp)	Pendapatan Realisasi (Rp)	Pendapatan Tingkat (%)	Realisasi Kategori Efektivitas
2022	19.669.862.500	24.446.693.465	124,29	Sangat Efektif
2023	29.609.862.500	29.504.893.294	99,65	Efektif
2024	35.975.005.226	35.241.693.552	97,96	Efektif

Sumber: CaLK Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2022; Laporan Keuangan Bapenda 2023; Laporan Keuangan Bapenda 2024

Secara struktural, pendapatan daerah Kabupaten Sigi masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Fenomena ini konsisten dengan temuan empiris pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, di mana tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih berkisar 60–85 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun telah berlangsung dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, tingkat kemandirian fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Meskipun demikian, tren realisasi PAD yang terus meningkat menunjukkan adanya upaya sistematis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui intensifikasi pajak daerah, ekstensifikasi objek pajak, dan perbaikan sistem administrasi pemungutan pendapatan.

2. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pendapatan Daerah: Analisis Efektivitas Pendapatan

Dalam kerangka performance management, fase perencanaan kinerja tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan yang realistis berbasis potensi ekonomi lokal dan kinerja historis. Verbeeten (2008) menegaskan bahwa kejelasan target kinerja merupakan prasyarat utama bagi efektivitas sistem performance management, karena target yang realistis akan memfasilitasi pengukuran capaian kinerja yang objektif dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Hasil analisis efektivitas pendapatan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pendapatan Kabupaten Sigi mengalami evolusi signifikan selama periode penelitian, dengan tingkat efektivitas yang berada pada kategori sangat efektif hingga efektif.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 124,29 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan fenomena *overachievement* yang substansial dengan selisih realisasi sebesar Rp4,78 miliar di atas target. *Overachievement* dalam konteks perencanaan pendapatan dapat diinterpretasikan secara ambivalen: di satu sisi, pencapaian yang melampaui target menunjukkan kinerja pemungutan yang sangat baik dan potensi pendapatan yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam proses perencanaan. Namun, di sisi lain, deviasi yang terlalu besar antara target dan realisasi mengindikasikan kelemahan dalam proses perencanaan pendapatan yang berbasis data dan analisis potensi yang akurat. Murti et al (2021) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem pengukuran kinerja di pemerintah daerah Indonesia adalah keterbatasan kapasitas dalam menggunakan data historis dan informasi kinerja untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis.

Pola kinerja pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas perencanaan pendapatan, dengan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 99,65 persen dan 97,96 persen. Tingkat efektivitas yang mendekati 100 persen ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah memanfaatkan informasi kinerja tahun sebelumnya (feedback loop) untuk menyusun target yang lebih realistis dan terukur. Castelo & Gomes (2024) menegaskan bahwa performance measurement processes yang efektif harus memastikan bahwa sumber daya organisasi tetap selaras dengan kebijakan pemerintah melalui siklus perencanaan berbasis kinerja yang berkelanjutan. Stabilisasi tingkat efektivitas pada kisaran 97–99 persen mengindikasikan bahwa Kabupaten Sigi telah menerapkan prinsip performance-based planning, di mana target pendapatan ditetapkan berdasarkan analisis potensi pendapatan, tren pertumbuhan historis, dan kondisi ekonomi lokal yang realistis.

Meskipun demikian, dalam perspektif performance management yang holistik, efektivitas pendapatan tidak hanya diukur dari pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga dari konsistensi pemanfaatan informasi kinerja dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ferreira & Otley (2009) menekankan bahwa sistem performance management yang efektif harus mampu menghubungkan indikator kinerja dengan proses pengambilan keputusan manajerial yang responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu, meskipun tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Sigi berada pada kategori yang baik, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan deviasi antara target dan realisasi, serta mekanisme koreksi yang diterapkan pemerintah daerah untuk periode perencanaan berikutnya.

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Indikator Dinamika Kinerja

Analisis pertumbuhan PAD merupakan dimensi penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah karena memberikan gambaran mengenai tren perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan efektivitas kebijakan pendapatan yang diterapkan pemerintah daerah. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, Kabupaten Sigi mencatat pertumbuhan realisasi pendapatan yang positif dan relatif konsisten selama periode penelitian, dengan tingkat pertumbuhan 20,69 persen pada periode 2022–2023 dan 19,44 persen pada periode 2023–2024.

Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022–2024

Periode	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Pertumbuhan (%)
2022–2023	24.446.693.465	29.504.893.294	+ 20,69
2023–2024	29.504.893.294	35.241.693.552	+ 19,44

Sumber: Data LRA Bapenda Kabupaten Sigi 2022–2024

Tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 20,07 persen per tahun ini secara signifikan melampaui benchmark pertumbuhan PAD nasional yang umumnya berada pada kisaran 8–10 persen per tahun. Sebagai pembandingan, Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan kinerja fiskal yang relatif baik mencatat pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sigi telah melakukan upaya intensif dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui berbagai strategi, termasuk intensifikasi pemungutan pajak daerah, ekstensifikasi basis objek pajak, perbaikan sistem administrasi pendapatan, dan kemungkinan implementasi digitalisasi layanan perpajakan daerah.

Konsistensi pertumbuhan yang relatif stabil pada kedua periode penelitian (selisih hanya 1,25 persen) mencerminkan adanya keberlanjutan kebijakan pendapatan dan kapasitas fiskal daerah yang semakin matang. Dalam perspektif performance management, pertumbuhan pendapatan yang konsisten menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi kinerja telah berfungsi dengan baik

sebagai mekanisme umpan balik (feedback mechanism) untuk perbaikan berkelanjutan. Nurfadila (2024) menegaskan bahwa performance management berfungsi sebagai jembatan antara strategi organisasi dan hasil kinerja yang dicapai, di mana konsistensi kinerja mengindikasikan efektivitas strategi yang diterapkan.

Namun demikian, analisis pertumbuhan pendapatan juga perlu mempertimbangkan komposisi sumber pertumbuhan tersebut. Said et al (2025) menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang berkelanjutan harus ditopang oleh diversifikasi sumber pendapatan dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua komponen PAD tertentu. Ketergantungan pada sumber pendapatan yang terbatas dapat menciptakan kerentanan fiskal ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan yang mempengaruhi sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap kontribusi masing-masing komponen PAD menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan daerah.

4. Analisis Kontribusi PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikator kunci dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Putri & Kusumastuti (2024) menekankan bahwa kemandirian fiskal yang tinggi tercermin dari besarnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri dengan minimnya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dalam konteks Indonesia, tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat bervariasi antarwilayah, dengan rata-rata nasional berada pada kisaran 10–15 persen untuk kabupaten/kota, sementara daerah dengan kinerja fiskal baik dapat mencapai kontribusi PAD hingga 30–35 persen.

Meskipun data spesifik mengenai struktur total pendapatan daerah Kabupaten Sigi (termasuk pendapatan transfer) tidak ditampilkan secara rinci dalam penelitian ini, pola umum yang ditemukan pada sebagian besar pemerintah kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) pada berbagai kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa PAD rata-rata hanya berkontribusi 12,21 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan lebih dari 85 persen pendapatan masih bersumber dari dana transfer pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil). Kondisi serupa ditemukan pada Kota Malang yang meskipun memiliki kinerja PAD yang baik, namun masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer sebesar 62 persen pada tahun 2024.

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sigi, sebagaimana halnya dengan sebagian besar pemerintah kabupaten di Indonesia, masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Dalam literatur keuangan publik, tingkat kemandirian fiskal diklasifikasikan berdasarkan rasio PAD terhadap total belanja daerah atau PAD terhadap dana transfer: rasio 0–25 persen menunjukkan kemandirian yang sangat rendah, 25–50 persen menunjukkan kemandirian rendah, 50–75 persen menunjukkan kemandirian sedang, dan di atas 75 persen menunjukkan kemandirian tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dapat membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengurangi ruang fiskal untuk inovasi pelayanan publik.

Dari perspektif performance management, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal sebagai tujuan strategis jangka panjang. Arnaboldi et al (2015) menekankan bahwa reformasi penganggaran berbasis kinerja di sektor publik bertujuan untuk memperkuat hubungan antara perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pengukuran kinerja, dan pencapaian hasil (outcome) kebijakan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, hal ini berarti bahwa

perencanaan dan kebijakan pendapatan harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai target tahunan, tetapi juga untuk secara sistematis meningkatkan kontribusi PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui strategi diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan basis pajak, dan peningkatan kapasitas pemungutan pendapatan.

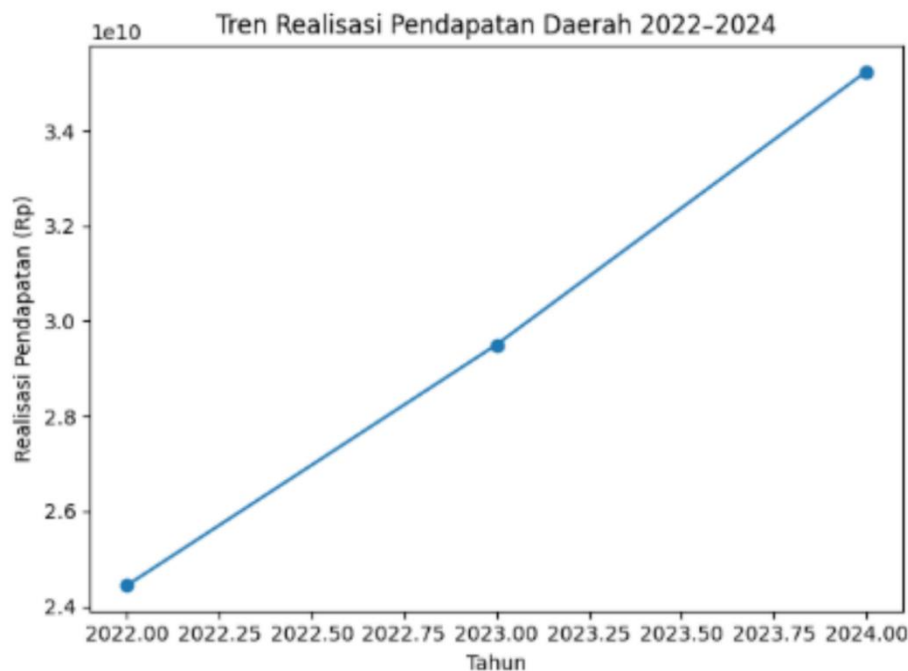
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Analisis Tren dan Pola Kinerja Pendapatan

Gambar 1 dan Gambar 2 menyajikan visualisasi mengenai perbandingan target dan realisasi pendapatan serta tren realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sigi selama periode 2022–2024. Analisis visual ini memberikan beberapa temuan penting dalam perspektif monitoring dan evaluasi kinerja.



Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022–2024

Gambar 1 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah selama periode penelitian. Pada tahun 2022, terlihat adanya gap yang signifikan antara target dan realisasi, dengan realisasi melampaui target sebesar 24,29 persen. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, overachievement ini mengindikasikan adanya *conservative budgeting* atau *underestimation* dalam proses perencanaan pendapatan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan data historis atau analisis potensi pendapatan yang belum optimal. Pada tahun 2023 dan 2024, gap antara target dan realisasi menyempit secara signifikan, dengan realisasi berada sangat dekat dengan target yang ditetapkan. Pola konvergensi ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan yang berbasis data dan informasi kinerja historis, sesuai dengan prinsip *performance management* yang menekankan pentingnya *learning process* dan *continuous improvement*.



Gambar 2. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022–2024

Gambar 2 menampilkan tren realisasi pendapatan daerah yang menunjukkan pola peningkatan konsisten dan linear selama periode penelitian. Tren positif ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kinerja pengelolaan pendapatan daerah, yang didukung oleh efektivitas kebijakan pendapatan, peningkatan kapasitas pemungutan, dan kemungkinan pertumbuhan ekonomi lokal yang memberikan dampak positif terhadap basis pajak daerah. Dalam kerangka performance management, tren peningkatan yang konsisten mencerminkan bahwa proses monitoring dan evaluasi kinerja telah berfungsi dengan baik sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mendorong implementasi kebijakan korektif.

Hasthoro & Sunardi (2016) menegaskan bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik apabila indikator kinerja digunakan secara aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan sekadar sebagai instrumen pelaporan administratif. Konsistensi pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sigi mengindikasikan bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan pendapatan, meskipun masih diperlukan evaluasi lebih mendalam mengenai sejauh mana informasi kinerja tersebut secara sistematis diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis jangka panjang.

6. Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam Pengambilan Keputusan: Evaluasi Implementasi Performance Management

Fase terakhir dan paling krusial dalam siklus performance management adalah pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berkelanjutan. Costumato, (2021) menegaskan bahwa performance management bukan sekadar sistem pengukuran kinerja, tetapi merupakan sistem terintegrasi yang menggunakan informasi kinerja untuk memperbaiki kinerja organisasi publik secara berkelanjutan melalui proses learning dan adaptation. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, hal ini berarti bahwa hasil analisis efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi pendapatan harus secara aktif dimanfaatkan untuk menginformasikan keputusan mengenai penetapan target periode berikutnya, penyusunan strategi optimalisasi pendapatan, alokasi sumber daya untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, serta evaluasi kebijakan pendapatan yang berlaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi positif mengenai pemanfaatan informasi kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi, sebagaimana tercermin dari perbaikan kualitas perencanaan pendapatan pada tahun 2023 dan 2024 yang merespons fenomena overachievement pada tahun 2022. Penyesuaian target pendapatan yang lebih realistis pada periode-periode selanjutnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan data kinerja historis sebagai basis untuk perencanaan yang lebih akurat. Namun demikian, dari perspektif performance management yang komprehensif, pemanfaatan informasi kinerja tidak hanya terbatas pada penyesuaian target, tetapi juga harus mencakup evaluasi sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan (baik internal maupun eksternal), identifikasi best practices dan area perbaikan, serta pengembangan strategi inovatif untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal daerah.

Bojang (2021) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem performance management di pemerintah daerah Indonesia adalah kesenjangan antara pengukuran kinerja (performance measurement) dan pengelolaan kinerja (performance management). Banyak pemerintah daerah telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang menghasilkan data dan laporan kinerja secara rutin, namun informasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perbaikan kinerja karena keterbatasan kapasitas analitis, budaya organisasi yang belum berorientasi pada data, atau ketiadaan mekanisme formal untuk menerjemahkan informasi kinerja menjadi rekomendasi kebijakan yang actionable. Castelo & Gomes (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan informasi kinerja secara efektif memerlukan tidak hanya ketersediaan data, tetapi juga komitmen manajerial, kapasitas analitis, dan budaya organisasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

Dalam konteks Kabupaten Sigi, meskipun terdapat indikasi bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan pendapatan, masih diperlukan penguatan sistematis terhadap mekanisme pemanfaatan informasi kinerja dalam dimensi-dimensi lain dari pengelolaan pendapatan, seperti: (1) evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pendapatan spesifik (misalnya, kebijakan insentif pajak, sistem pemungutan berbasis digital, program ekstensifikasi objek pajak); (2) benchmarking kinerja dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengidentifikasi gap kinerja dan pembelajaran best practices; (3) analisis mendalam terhadap struktur dan komposisi PAD untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi; dan (4) pengembangan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan basis ekonomi lokal.

7. Sintesis Pembahasan: Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Kerangka Performance Management

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi selama periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan positif dengan tren pertumbuhan yang konsisten dan tingkat efektivitas yang baik. Dari perspektif kuantitatif, capaian kinerja pendapatan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan pertumbuhan rata-rata 20 persen per tahun dan tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Namun, evaluasi dari perspektif performance management yang holistik mengungkapkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah masih lebih berorientasi pada pencapaian output (realisasi pendapatan) dibandingkan dengan orientasi pada proses (process-oriented) dan pembelajaran berkelanjutan (learning-oriented).

Beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut meliputi: pertama, variasi tingkat efektivitas antarperiode (dari 124,29% pada 2022 menjadi 97,96% pada 2024) yang mengindikasikan bahwa proses perencanaan pendapatan masih dalam tahap penyempurnaan dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem forecasting yang robust berbasis data dan analisis potensi yang komprehensif. Kedua, meskipun pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan tingkat kemandirian fiskal masih relatif rendah, yang mencerminkan bahwa

sistem pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan tujuan strategis jangka panjang berupa peningkatan kemandirian fiskal dalam siklus perencanaan dan evaluasi kinerja. Ketiga, belum optimalnya dokumentasi dan diseminasi mengenai pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan kebijakan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa mekanisme feedback loop dalam siklus performance management masih perlu diperkuat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Christensen et al (2006) keberhasilan performance management di sektor publik sangat bergantung pada kapasitas tata kelola dan komitmen organisasi dalam menggunakan informasi kinerja secara konsisten untuk perbaikan berkelanjutan. Wijaya, (2022) menambahkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif menuntut adanya integrasi yang kuat antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi berbasis data, dan pengambilan keputusan manajerial yang responsif. Dalam konteks Kabupaten Sigi, penguatan sistem performance management dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: (1) pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan berbasis data dan monitoring kinerja real-time; (2) penguatan kapasitas analitis aparatur dalam memanfaatkan informasi kinerja untuk evaluasi kebijakan dan penyusunan rekomendasi strategis; (3) implementasi mekanisme benchmarking kinerja dengan daerah lain untuk pembelajaran best practices; (4) pengembangan strategi jangka menengah dan panjang untuk diversifikasi sumber PAD dan peningkatan kemandirian fiskal; dan (5) penguatan akuntabilitas kinerja melalui transparansi publik mengenai capaian kinerja pendapatan dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.

Arnaboldi et al (2015) menekankan bahwa kinerja pendapatan yang berkelanjutan memerlukan keterkaitan yang kuat antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam siklus yang kontinu. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Sigi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam dimensi output (capaian realisasi pendapatan), penguatan lebih lanjut terhadap dimensi proses dan pembelajaran dalam siklus performance management akan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan mencapai tujuan strategis berupa peningkatan kemandirian fiskal daerah.

KESIMPULAN

Evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi periode 2022–2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mencapai kinerja kuantitatif yang positif dengan tingkat efektivitas berada pada kategori efektif (97,96%–124,29%) dan pertumbuhan pendapatan rata-rata 20,07 persen per tahun yang melampaui benchmark nasional, serta peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan pendapatan yang tercermin dari konvergensi target dan realisasi pada periode 2023–2024. Namun, dari perspektif performance management yang holistik, implementasi sistem pengelolaan pendapatan daerah masih bersifat output-oriented dengan pemanfaatan informasi kinerja yang belum optimal, sebagaimana ditunjukkan dari kontribusi PAD yang masih rendah terhadap total pendapatan daerah (mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat) dan belum optimalnya integrasi antara pengukuran kinerja dengan pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Penguatan lebih lanjut terhadap sistem performance management memerlukan pengembangan kapasitas analitis, implementasi sistem informasi manajemen pendapatan yang terintegrasi, dan pengembangan strategi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi sumber PAD. Dengan demikian, pencapaian kinerja pendapatan Kabupaten Sigi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengimplementasikan performance management yang lebih matang dan berorientasi pada hasil (results-oriented) yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnaboldi, M., Lapsley, I., & Steccolini, I. (2015). Performance Management in the Public Sector: The Ultimate Challenge. *Financial Accountability & Management*, 31(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/faam.12049>
- Bojang, M. B. S. (2021). Appraising Public Value in the Public Sector: Re-evaluation of the Strategic Triangle. *SEISENSE Journal of Management*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.33215/sjom.v4i2.551>
- Castelo, S. L., & Gomes, C. F. (2024). The role of performance measurement and management systems in changing public organizations: An exploratory study. *Public Money & Management*, 44(5), 399–406. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2204400>
- Christensen, T., Lægreid, P., & Stigen, I. M. (2006). Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. *International Public Management Journal*, 9(2), 113–139. <https://doi.org/10.1080/10967490600766987>
- Cienfuegos, I., Retamal-Soto, K., & Penaglia, F. (2025). Principles of post-new public management in public administration curricula: The case of public administration schools in Chile. *Journal of Public Affairs Education*, 31(4), 500–524. <https://doi.org/10.1080/15236803.2025.2489223>
- Costumato, L. (2021). Collaboration among public organizations: a systematic literature review on determinants of interinstitutional performance. *International Journal of Public Sector Management*, 34(3), 247–273. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2020-0069>
- Dody Wijaya, A. (2022). Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA*, 3(1), 47–67. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.685>
- Dudin, M., Susandra, F., & Melani, M. M. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Kearifan*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2796>
- Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. *Management Accounting Research*, 20(4), 263–282. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003>
- Forte, C. (2025). Government Revenue Structure and Fiscal Performance in the G7: Evidence from a Panel Data Analysis. *World*, 6(3), 97. <https://doi.org/10.3390/world6030097>
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Mucoz, L. A., & Bolívar, M. P. R. (2015). Determining Factors of Transparency and Accountability in Local Governments: A Meta-Analytic Study. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 13(2), 129–160. [https://doi.org/10.4335/13.2.129-160\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.129-160(2015))
- Murti, R. B., Mahmudi, M., & Nurfauziya, A. (2021). An analysis of performance measurement system used in Indonesia local government. *Journal of Contemporary Accounting* 3(2), 64–76. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss2.art2>
- Nurfadila, N. (2024). Enhancing Public Financial Management through Performance Evaluation and Cost Systems. *Advances in Management & Financial Reporting* 2(1), 24–35.

<https://doi.org/10.60079/amfr.v2i1.264>

- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- OECD. (2023). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. In OECD Business and Finance Policy Papers (OECD Business and Finance Policy Papers, Vol. 39). <https://doi.org/10.1787/56003a32-en>
- Prabowo, S., & Bawono, I. R. (2023). The Affecting of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund on Capital Expenditures in Central Java. *JURNAL AKUNTANSI*, 18(2), 121–131. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i2.8336>
- Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users. (2011). INTERNATIONAL MONETARY FUND. <https://doi.org/10.5089/9781616351564.069>
- Putri, A. M. N., & Kusumastuti, S. Y. (2024). Fiscal and Monetary Policy Interaction Post Indonesian Institutional Transformation: Vector Autoregression Approach. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.31685/kh78mn12>
- Riantisari, R., Nurrokhmini, A., & Ghazali, B. Al. (2025). Analyzing Government Financial Performance as a Basis for Sustainable Development. Case Study on The Government of Klaten. *ECoFin*, 7(1), 84–95. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.1741>
- Said, S. N. R., Rais, A. H., & Timur, I. (2025). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. *Advances in Management & Financial Reporting* 3(3), 1111–1128. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.637>
- Salam, M. (2024). Realisasi pendapatan daerah Sigi Tahun 2024 capai Rp1,4 triliun. ANTARA News. <https://sulteng.antaranews.com/berita/350581/realisasi-pendapatan-daerah-sigi-tahun-2024-capai-rp14-triliun>
- Siswadhi, F. (2025). Local Government Performance in the Digital Age: An Analysis of the Role of Organizational Culture in Kerinci Regency and Sungai Penuh City Governments. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(48s), 484–492. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i48s.9569>
- Verbeeten, F. H. M. (2008). Performance management practices in public sector organizations. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 21(3), 427–454. <https://doi.org/10.1108/09513570810863996>
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>